

BAB II

PENGELOLAAN PASAR DAERAH

A. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”.¹⁶ Manajemen didefinisikan sebagai pencapaian organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan sumber daya organisasi (*manner through planning, organizing, leading, and controlling organizational resources*).¹⁷

Terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen, dengan kata kerja *to manage* yang secara umum berarti mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina atau memimpin,¹⁸ juga mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen.¹⁹

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber

¹⁶ Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, (Jakarta: PT. Tema Baru, 1989), hlm. 129.

¹⁷ Richard L. Daft and Dorothy Marcic, *Understanding Management 10th edition*, (Canada : Cengage Learning Products, 2015), hlm. 7

¹⁸ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Managemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 114.

¹⁹ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) hlm. 1.

daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Drs. H. Melayu S.P. Hasibuan dalam bukunya yang berjudul *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah* mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sedangkan menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnel, "*Management is getting things done through people. In bringing about this coordinating of group activity, the manager, as a manager plans, organizes, staffs, direct, and control the activities other people*". Artinya: manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian.²⁰

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggungjawab atas pekerjaan tertentu.²¹

Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.²²

²⁰ Hendrianto, *Manajemen Strategi Pengelolaan Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pasar Segamas Purbalingga)*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018, hlm. 16-17

²¹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Op.Cit.*

²² Handyaningrat, *Pengantar Studi.*, hlm. 9.

Menurut Balderton dalam buku Rahardjo Adisasmita mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Moekjiat dalam buku Rahardjo Adisasmita mengemukakan bahwa pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan.²³

Menurut Suharsimi Arikunta pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.²⁴ Sedangkan menurut Hamalik dalam buku Rahardjo Adisasmita bahwa istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan, hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Balderton yang mengemukakan hal yang sama antara pengelola dengan manajemen, yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya.²⁵

²³ Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah Daerah*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2016) hlm. 113.

²⁴ Suharsimi Arikunta, *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, (Jakarta: CV, Rajawali, 1988). hlm. 8.

²⁵ Rahardjo Adisasmita, *Op.Cit*, hlm. 22.

Mary Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.²⁶

Dari beberapa pengertian pengelolaan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan agar sesuai dengan ketetapan dalam rencana sebelumnya.

B. Pasar

1. Pengertian Pasar

Pasar menurut Cyril S. Belshaw adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.²⁷

²⁶ Emi Tisnawati Sule dan Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), hlm. 6.

²⁷ Saswidji Widoatmodjo, *Pengetahuan Pasar Modal*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015, hlm. 2.

Definisi pasar juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang menyatakan pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, *Mall*, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.²⁸

2. Jenis-Jenis Pasar

a. Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dengan melalui tawar menawar.²⁹

Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari, seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur,

²⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

²⁹ *Ibid.*

daging, kain, pakaian, barang elektronik. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya.³⁰

Di Indonesia pasar tradisional memiliki peran sangat penting karena merupakan wadah yang secara langsung dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak terutama para petani termasuk nelayan untuk menjual hasil-hasil bumi mereka, pemilik/pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah (UMKN), terutama dikelompok industri kerajinan seperti souvenir, makanan, minuman, pakaian, produk-produk dari kayu, bambu dan rotan (termasuk mebel), alas kaki, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Lewat peran ini, maka dengan sendirinya secara tidak langsung, keberadaan atau perkembangan pasar rakyat akan memberi kontribusi yang bisa signifikan terhadap peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan produk domestik regional bruto, dan pendapatan rata-rata masyarakat, dan penurunan tingkat kemiskinan. Dalam perkataan lain, keberadaan atau perkembangan pasar rakyat sangat penting sebagai pondasi dasar perekonomian daerah/wilayah.³¹

b. Pasar Modern

Pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta atau koperasi yang bentuknya berupa *mall*, *supermarket*, *departemen store*, dan *shopping center* yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan dan kenyamanan berbelanja dengan

³⁰ Satria, *Pasar Modern Dan Pasar Tradisional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). hlm. 18.

³¹ Tulus Tambunan, *Pasar Tradisional dan Peran UMKN*, (Bogor: PT Penertbit IPB Press, 2020). hlm. 9.

manajemen berada pada satu tangan bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti. Pasar modern tidak banyak berbeda dengan pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang, berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual selain bahan makanan, seperti buah, sayuran, daging dan sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama.³²

3. Ciri-Ciri Pasar Tradisional

Menurut Lilananda pasar tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Terdiri dari kios-kios atau gerai oleh penjual.
- b. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa sayur, buah, ikan, telur, daging, pakaian, dan barang dagangan lainnya.
- c. Umumnya terletak dekat kawasan pemukiman masyarakat, agar memudahkan pembeli mencapai pasar.
- d. Sistem pembelian barang akan dilakukan dengan tawar-menawar.
- e. Pasar tradisional beroperasi mulai subuh.
- f. Hubungan ekonomis antara sesama pedagang pasar tradisional dengan saling menjamin uang atau memberikan hutang barang dagangannya dengan pedagang pasar lainnya yang cukup mereka kenal.

³² Satria, *Op. Cit.*, hlm. 9.

g. Para pedagang pasar tradisional saling berebut dan menarik perhatian para langganannya untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin, akan tetapi para pedagang masih bersahabat antar pedagang.

4. Kelebihan dan Kekurangan Pasar Tradisional

a. Pasar tradisional memiliki beberapa keunggulan bila dibandingkan dengan pasar modern. Adapun kelebihan pasar tradisional yaitu sebagai berikut :

- 1) Lokasi dekat dengan rumah, sehingga lebih efektif dan efisien.
- 2) Barangnya lebih segar untuk produk tertentu, seperti bahan-bahan, sayur-sayuran, dan daging. Hal ini karena pedagang langsung memperoleh barang dari petani.
- 3) Adanya tawar-menawar harga, sehingga jika membeli dalam jumlah yang banyak maka akan didapatkan harga yang lebih murah.
- 4) Para pembeli yang berasal dari masyarakat berpendapatan menengah kebawah merasa lebih percaya diri jika berbelanja dipasar tradisional dibandingkan pasar modern.
- 5) Para pedagang paham benar bahwa pembelinya adalah mereka yang berasal dari golongan menengah kebawah, sehingga memungkinkan pembeli barang dalam kualitas yang sangat kecil.

- 6) Hubungan antara pedagang dan pembeli cukup akrab dan saling percaya, sehingga memungkinkan pembeli melakukan pembelian secara kredit.
 - 7) Guna menjaga hubungan dengan konsumen para pedagang sering kali memberikan discount ataupun hadiah pada hari-hari tertentu.
 - 8) Pedagang mengerti benar kualitas barang dagangannya sehingga dapat memberikan informasi dan mengarahkan pembeli pada barang yang terbaik.
- b. Pasar tradisional memiliki beberapa kelemahan bila dibandingkan dengan pasar modern. Berikut kekurangan pasar tradisional.
- 1) Terdapat masalah infrastruktur yang kurang memadai seperti kebersihan dan tempat pembuangan sampah yang kurang terpelihara, kurangnya lahan parkir, dan buruknya sirkulasi udara.
 - 2) Minimnya daya dukung karakteristik pedagang tradisional, seperti strategi perencanaan yang kurang baik.
 - 3) Kurang perhatian terhadap pemeliharaan sarana fisik sehingga pasar tradisional kurang terawat.
 - 4) Adanya pedagang kaki lima yang tidak tertib karena berjualan dibahu jalan, sehingga pasar terlihat tidak rapi.
 - 5) Kurang tegasnya pengurus pasar dalam menangani pedagang kaki lima.

- 6) Pada beberapa pasar tradisional terdapat praktek premanisme yang sangat mengganggu kelancaran dan efisiensi transaksi antara pembeli dan penjual.
- 7) Tidak ada pengawasan terhadap barang yang dijual dan standarisasi ukuran dan timbangan.
- 8) Dagangan yang bersifat makanan siap saji mempunyai kesan kurang higienis.³³

C. Good Governance

Secara terminologi *governance* memiliki arti: *rule with authority and conduct the policy, actions and affairs (of state, subjects) constitutionally*; yaitu otoritas dalam mengatur dan menggerakkan kebijakan, strategi serta hubungan antara komponen dalam negara sesuai konstitusi.³⁴

ESCAP mendefinisikan *governance* sebagai suatu proses pengambilan keputusan dan proses diimplementasikannya atau tidak diimplementasikannya keputusan tersebut (*the process of decision making and the process by which the decision are implimented (or not implemented)*). Istilah *governance* menurut ESCAP dapat digunakan dalam beberapa konteks seperti *corporate governance, internasional governance, nasional governance, dan local governance*³⁵

³³ *Ibid.* hlm. 27.

³⁴ Abidari Rosidi dan Anggraeni Fajriani, *Reinventing Government*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), hlm. 4

³⁵ Yap Kioe Sheng, *What is Good Governance*, (Bangkok : UNESCAP, 2009), hlm. 1

UNDP (United Nations Development Programme) mendefinisikan governance sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a country’s affair at all levels of society*” (pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelolah masalah bangsa). Karena itu menurut UNDP, ada tiga model Good Governance, yaitu : a) pemerintahan politik (political Governance) yang mengacu pada proses-proses pembuatan berbagai keputusan untuk perumusan kebijakan (politicaly/strategy formulation); b) pemerintahan ekonomi (economic Governance) yang megacu pada proses pembuatan keputusan (decision making processes) yang memfasilitasi kegiatan ekonomi di dalam negeri dan berinteraksi diantara penyelenggara ekonomi. Pemerintahan ekonomi memiliki implikasi terhadap masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup; c) pemerintahan administratif (Administrative Governance) yang mengacu pada sistem implementasi kebijakan.³⁶

Good governance menurut Word Bank bisa didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip keterbukaan, keadilan dan pasar yang efisien, menghindari salah alokasi dana investasi, mencegah korupsi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan hukum dan politik yang mendorong tumbuhnya aktivitas usaha. Sedangkan Sumarto Hetifa menjelaskan bahwa *good governance* adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan

³⁶ Vica Mutiara Shandy, *Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2017, hlm. 14-15.

bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan mencegah korupsi baik secara politik dan administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Ciri-ciri *good governance* dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. *Participation*: yaitu keterlibatan setiap komponen dalam suatu entitas atau institusi.
2. *Rule of Law*: yaitu memiliki kerangka kerja dan standar operasional yang jelas sehingga bisa menghindari kebijakan yang diskriminatif atau subjektif.
3. *Transparency*: yaitu setiap keputusan yang diambil berdasarkan kerangka kerja dan standar operasional yang dapat diketahui dan dapat di akses informasi prosesnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
4. *Responsiveness*: yaitu setiap institusi dalam proses pengambilan keputusannya harus memperhatikan dan mampu melayani seluruh *stakholder* dalam batasan-batasan yang rasional.
5. *Consensus Oriented*: yaitu setiap komponen dalam institusi diharuskan menjalankan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama atau mufakat serta menghindari adanya kepentingan-kepentingan sepihak.
6. *Equity and Inclusiveness*: yaitu suatu keputusan mampu menjamin hak-hak setiap komponen dalam institusi sehingga mereka merasa nyaman menjalankan aktivitas dan tugas mereka.

7. *Effectiveness and Efficiency*: melalui dukungan seluruh stakeholder suatu entitas bisnis atau institusi pelayanan publik diharapkan tercapai tujuan yang dicita-citakan atau ditargetkan dengan penggunaan sumber daya (*resources*) secukupnya, sehingga suatu entitas dan institusi akan berpeluang beroperasi secara berkesinambungan (*sustainable*).
8. *Accountability*: akuntabilitas merupakan persyaratan kunci dalam menciptakan *good governance*. Baik pemerintah maupun swasta memerlukan jaminan akuntabilitas untuk mendapatkan kepercayaan publik. Kemampuan akuntabilitas entitas maupun institusi akan memunculkan kepercayaan publik yang akan menjadi indikator apakah entitas atau institusi tersebut layak disebut memiliki *good governance* atau *bad governance*.³⁷

Terdapat tiga pilar yang saling berkaitan untuk mewujudkan *good governance*, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Tetapi yang dijadikan sebagai acuan atau landasan referensi bagi peneliti adalah transparansi dan akuntabilitas.

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan lembaga-lembaga sektor publik dalam memberikan informasi dan *disclosure* yang diberikan harus dapat dipahami dan dimonitor oleh masyarakat. Transparansi mewajibkan adanya sistem informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat

³⁷ Abdul Muin, Halim, Aang Kunafi. *Manajemen Pendidikan (Good Governance dalam Lembaga Pendidikan) Teori, Strategi dan Riset Implementasi*. (Duta Media Publishing, 2017). hlm. 12-14.

diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan dan lain-lain. Transparansi adalah kriteria lainnya yang terpenting dalam *good governance*. Hal ini sesuai sebagaimana dijelaskan dalam hukum Islam bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang terbuka, Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 42.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعَالَمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya : Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.³⁸

Transparansi atau keterbukaan dapat dilihat dari tiga aspek, yakni: (1) adanya kebijakan yang terbuka terhadap pengawasan, (2) adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, (3) berlakunya prinsip check and balance antar lembaga eksekutif dan legislatif. Terdapat beberapa indikator dari transparansi yaitu sebagai berikut :

- a) Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab.
- b) Kemudahan akses informasi.
- c) Menyusun mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan uang suap.
- d) Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : PT Syqma Examedia Arkanleema, 2009).

2. Akuntabilitas (*Accountabilty*)

Akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terdapat beberapa indikator dari akuntabilitas yaitu sebagai berikut:

- a) Proses pembuatan keputusan yang dibuat tertulis, tersedia bagi yang membutuhkan, memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.
- b) Kejelasan dari sasaran kebijakan yang sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi serta standar yang berlaku.³⁹

Menjadi pemimpin haruslah memberi teladan yang baik bagi semua orang. Dalam Islam setiap orang merupakan pemimpin yang seharusnya memiliki rasa kepemimpinan dan tanggung jawab, hal ini dapat dilihat dari hadis berikut :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ⁴⁰

Artinya: Dari Ibnu Umar ra., ia berkata : Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda :”Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin

³⁹ Haslinda, *Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Majene*. (Skrispi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar), hlm. 16-17 .

⁴⁰ Abu' Abd Allah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kitab *ahkam*, Bab *Qouililahi ta'ala athi'ullah*, (Beirut lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992) Juz VII, hlm. 444

keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelola harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu, kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴¹

Hadist di atas telah menerangkan bahwa setiap manusia adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat oleh Allah SWT. dan tak seorangpun mampu melepaskan diri dari tanggungjawabnya. Kelak akan dimintai pertanggung jawaban tentang apa yang ada dalam amanahnya. Dengan demikian, pemimpin yang tidak amanah adalah berdosa.

Pemimpin yang tidak bertanggung jawab juga berdosa. Jika ada satu orang saja tidak baik, maka pemimpin kelak yang akan ditanya. Jika ada satu orang saja terlantar, tidak mendapatkan apa yang harus dia dapatkan, maka pemimpin yang akan mempetanggung jawabkannya di hadapan Allah. Karena itulah seorang pemimpin seharusnya mengerti tentang pengertian pemimpin itu sendiri, tujuan dan betapa pentingnya tugas pemimpin itu. Dia tak hanya membawa satu orang tapi seluruh warga di bawah kepemimpinannya. Jadilah seorang pemimpin yang baik dan bertanggung jawab, karena setiap orang merupakan pemimpin. Jika setiap orang mempunyai rasa kepemimpinan dalam dirinya maka kehidupan akan damai dan sejahtera.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 444.